Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Pendaftaran Legalitas Produk Halal Di Indonesia

Review of the Halal Product Guarantee Act Towards the Implementation of Halal Product Legality Registration in Indonesia

Kurnia Rusmiyati^{1*}, Ayu Gumilang Lestari² E. Mulya Syamsul³

¹²³Dosen Prodi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka, JL. KH. Abdul Halim
No. 103, Kec. Majalengka Kulon, Kab. Majalengka, 45418, Indonesia

*E-mail: kurniarusmiyati@unma.ac.id

ABSTRAK

Submit: 12-11-2024
Revisi: 25-11-2024
Disetujui: 09-01-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjabarkan perihal pendaftaran produk sertifikasi halal serta kendala implementasinya berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertifikasi halal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal wajib diintervensi oleh pemerintah demi untuk menjaga kepentingan *masalah* khususnya perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk, pemerintah juga diharuskan sebagai fasilitator, regulator dan pengawas.

Kata kunci: *jaminan produk halal, sertifikasi halal, implementasi.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the review of the Halal Product Guarantee Act describes the registration of halal certification products and the obstacles to its implementation based on existing facts. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of the study found that halal certification in the Law on Halal Product Guarantee must be intervened by the government in order to maintain the interests of *masalah*, especially consumer protection for the halalness of a product, the government is also required as a facilitator, regulator and supervisor.

Keywords: *halal product assurance, halal certification, implementation.*

How to Cite.

lestari, A. G., Rusmiyati, K., & Syamsul, M. (2024). Review of the Halal Product Guarantee Act Towards the Implementation of Halal Product Legality Registration in Indonesia. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.12982>

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari dua ratus dan tujuh juta orang atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Meski berpenduduk mayoritas Muslim, Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia tanpa mengurangi nilai-nilai hukum Islam. Dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya. Ini adalah dasar bahwa negara harus melindungi dan menjamin hak warga negaranya untuk beribadah dan kesanggupan menjalankan keyakinan yang diajarkan dalam agama mereka.

Halal adalah nilai yang baik, itu sebagai sebuah pernyataan yang tepat untuk mendefinisikan tentang konsep halal. Meski awalnya sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai landasannya (Akim:218), halal sekarang tidak lagi terbatas pada kewajiban agama kalangan Muslim. Secara etimologis, kata 'halal' mengacu pada arti dari apa adanya boleh dan bisa dilakukan karena gratis atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya (Mudhafier:2005).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu dari undang-undang yang masuk dalam klaster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*omnibus law*). Beberapa ketentuan/norma diubah sebagai upaya penataan regulasi untuk kemudahan izin berusaha di Indonesia, sertifikasi Halal untuk Produk UMK, perubahan kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kewenangan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam dalam peyelenggaraan LPH, penyederhanaan birokrasi, waktu penerbitan sertifikat Halal dan perubahan sanksi terhadap pelanggaran norma adalah beberapa ketentuan yang membedakan antara Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada klaster Jaminan Produk Halal (JPH) ini.

Sejatinya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, sebelum masuk dalam klaster penataan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum dapat diimplementasikan dengan baik. Kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia yang sudah harus diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014), juga belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sertifikasi sebagai inti dari pelaksanaan JPH untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sudah harus efektif berjalan setelah berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini diundangkan.

Masuknya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dalam klaster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sejatinya diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terdapat 24 ketentuan diantaranya 2 penambahan pasal baru dan pengubahan substansi 22 pasal yang ada dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Perubahan materi dan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal tersebut lebih menunjukkan keinginan kuat pemerintah dalam menata regulasi, kemudahan berinvestasi dan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya akan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi kendala sebelumnya. Perubahan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat cenderung menghilangkan *originalitas* nilai-nilai syariah yang menjadi ruh Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Soerjono dan Abdurrahman, 2003: 47; Deryabina 2018: melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto dan Mamudji, 2006 : 38). Setelah data

terkumpul, selanjutnya mengolah data, dimulai dengan mengklasifikasikan fakta, mengklasifikasikan masalah hukum yang diteliti, kemudian analisis hukum. Analisis dilakukan dengan metode doktrinal melalui optik preskriptif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah hukum. Hasil analisis akan muncul suatu kesimpulan yang memberikan pandangan hukum (Sunggono, 2007: 86).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pasar Halal di Indonesia

Sebelum berlakunya Produk UU Jaminan Halal, yang secara khusus mengatur masalah kehalalan produk di Indonesia, peraturannya mengenai produk halal tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen memiliki beberapa peraturan yang mengandung masalah halal. Berdasarkan Pasal 4 huruf (a), konsumen berhak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menyiratkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim di Indonesia, berhak mendapatkan barang yang menyediakan kenyamanan saat dikonsumsi. Salah satu yang nyaman pengertian bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama mereka (Apriyantono, dkk.:2013). Di samping itu, Pasal 4 ayat (c) Perlindungan Konsumen Undang-undang juga menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. UU ini menyiratkan bahwa informasi perusahaan atau label Halal pada suatu produk harus akurat, dan validitasnya diuji.

Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengklaim bahwa produk mereka halal sebelum melalui uji halal yang telah ditentukan. Menurut Zulham (2015) pengaturan produk halal dalam Undang-Undang ini adalah sukarela karena pengusaha berkewajiban untuk melakukan sertifikasi halal hanya jika mereka menempatkan "halal" pernyataan pada label produk.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 58 ayat (4) Undang-undang ini menyatakan bahwa produk yang berasal dari hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk pendistribusian harus didampingi oleh dokter hewan sertifikat dan Sertifikat Halal. Regulasi dari Sertifikat Halal untuk produk hewani dalam Undang-undang ini adalah wajib, yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal. Namun, setelah Pengadilan Peninjauan kembali Pasal 58 ayat (4) Undang-undang ini, frase "harus didampingi oleh dokter hewan sertifikat dan sertifikat halal" diartikan sebagai sertifikat halal wajib untuk produk hewani yang diizinkan secara hukum. Oleh karena itu, jelas bahwa pengaturan Pasal 58 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak melarang produksi dan distribusi hewan-produk turunan yang dilarang oleh syariat Islam.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Salah satu ketentuan penting dari Makanan, Undang-undang mengatur pelabelan makanan. Pasal 97 ayat (3) UU Pangan menyiratkan bahwa label makanan harus: memuat informasi tentang label halal untuk produk yang harus halal. Menurut Zulham (2015) norma untuk mengatur label halal dalam Undang-undang ini adalah wajib jika diperlukan. Meskipun peraturan sebelumnya tidak dibahas secara komprehensif tentang masalah halal, itu memberikan beberapa ketentuan untuk produk halal. UU Perlindungan Konsumen mengatur halal produk secara sukarela, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur produk halal wajib, sedangkan UU Pangan mengatur kehalalan produk secara

wajib jika diperlukan. Perbedaan dari norma akan menciptakan ketidakharmonisan antar peraturan yang pada gilirannya akan merugikan konsumen (Ambaliand:2014).

Kaidah Hukum Dan Urgensi Sertifikasi Halal

Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa "*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*" (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Produk adalah "*barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat*" (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Makna kata *wajib* dari bleid jika dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Artinya seluruh warga negara harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggaranya (pemerintah yang dibentuk dalam suatu badan yang disebut dengan Badan Pelaksana Jaminan produk Halal (BPJPH).

Ketentuan tentang halal dan haram dalam Islam diatur Al-Qur'an dan Hadis (Qs. Al-Baqarah [2]: 168, 172, 173 & Hadits dari Abu'Abdillah Nu'man bin Basyir R.A). Oleh karena itu, persoalan produk halal dan haram adalah *persoalan ibadah*. Yusuf Qardawi berpendapat: ada kaidah terkenal yang berkaitan dengan prinsip dasar halal dalam Islam "*Asal segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT) adalah halal atau mubah*" (Murtadho, 2019). Tidak ada sesuatu apapun yang haram kecuali berdasarkan teks/nash yang berasal dari Al-Qur'an ataupun Sunnah yang jelas mengharamkannya. Seandainya tidak ada teks/nash yang jelas menunjukkan keharamannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Dengan demikian, makna wajib dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, bertolak belakang dengan kaidah fikih dan nash-nash tersebut. Kaidah Fikih "*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan*" termasuk ke dalam rumpun muamalah, sedangkan dalam muamalah dinyatakan dalam kaidah yaitu "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

Pertanyaannya jika kaidah hukum tidak mewajibkan sertifikasi halal, mengapa dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal semua produk harus bersertifikasi halal. Menurut penulis ada beberapa faktor dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang menjiwai pertimbangan wajibnya semua produk harus disertifikasi, antara lain:

1. Kepentingan Publik/Maslahah

Seperti disebutkan dalam konsideran Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, "*Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan*", kemudian dalam konsideran berikutnya yang menyatakan "*pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum*", maka pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi jaminan halal tersebut. Jika dikaitkan dengan *public interest theory*, maka negara dapat melakukan intervensi membuat regulasi Jaminan Produk Halal yang salah satu ketentuannya: kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan. Intervensi ini didasarkan pada kebijaksanaan tentang *utility, welfare*, serta bukan sebagai upaya *to regulate in the dark* yang digunakan menghindari keterbukaan pada akses publik. Teori tersebut juga sesuai dengan aliran hukum *utilitarianisme* yang menempatkan *utility* sebagai tujuan utama dibentuknya suatu hukum. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan

sertifikasi halal ditujukan untuk kemanfaatan (pembenaran ekonomi) yang harus dirasakan masyarakat.

Menurut Ogus (2004), dasar pembenaran ekonomi dari suatu regulasi adalah adanya *market failure*. Mereka juga menjelaskan ada beberapa alasan intervensi negara untuk mengoreksi *market failure* melalui regulasi (*public interest*) adalah; (1) *Monopolies and natural monopolies*, (2) *Public goods*, (3) *Other externalities*, (4) *Information deficits (information asymmetries) and bounded rationality*, (5) *Coordination problems*, dan (6) *Exceptional market conditions and macro-economic considerations*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ogus (2004), salah satu alasan yang menjustifikasi dan membenarkan intervensi negara melalui regulasi di bidang ekonomi adalah *information asymmetries*. Kaitannya dengan JPH yaitu agar konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk halal, menjadikan sertifikat dan label halal menjadi *consumer information* sehingga tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi. Sebagaimana diketahui, *asymmetries information* terhadap kehalalan suatu produk akan menyulitkan, bahkan bagi konsumen sendiri tidak dimungkinkan untuk mengevaluasi akan kehalalan suatu produk tersebut.

Informasi yang minim terhadap kehalalan produk mempengaruhi objektivitas konsumen dalam memilih produk, maka regulasi tentang informasi yang rinci dan akurat tentang kehalalan produk dibutuhkan, agar kehalalan produk dapat diakses oleh konsumen.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi Halal yang diintervensi oleh pemerintah salah satu tujuannya: untuk menjaga kepentingan umum yang dianggap sangat vital. Kewajiban Sertifikat Halal dalam permasalahan ini dapat dipersamakan dengan intervensi pemerintah Pada Pertamina untuk mendistribusikan bahan bakar umum, listrik oleh PLN, Gas oleh PGN.

2. Faktor Perlindungan Konsumen dan Sejarah Perkembangan Halal

Belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk secara khusus serta kepastian hukum menjadi pendorong utama lahirnya Undang-undang ini. Hasil penelitian Susanto (1988), menemukan sejumlah produk yang sudah beredar luas di masyarakat ternyata mengandung produk turunan dari babi seperti gelatin (BPJPH, 2020). Kemudian kasus Ajinomoto (2000), juga menyadarkan pemerintah dan masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal untuk perlindungan konsumen khususnya Muslim. Untuk mewujudkan itu, dibentuklah LPPOM-MUI yang salah satu tujuannya untuk menyelenggarakan Sertifikasi Halal, meskipun secara yuridis masih belum menjamin kepastian hukum karena sifatnya sukarela.

3. Politik Hukum Nasional

Rasyid (2016), menyimpulkan ada korelasi signifikan perubahan politik nasional maupun internasional terhadap pelembagaan Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan kemunculan partai-partai Islam. Kondisi tersebut dimungkinkan secara politik karena faktor: 1) Kelompok Islam banyak berada dalam lembaga legislasi (DPR RI). 2) Banyaknya partai Islam. 3) Terjadi perubahan sistem politik, dari pendekatan elit ke perebutan suara rakyat. 4) Melanjutkan gagasan di Orde Baru untuk menarik investor Timur-Tengah dengan tetap mengembangkan Bank Islam dan perekonomian Islam. 5) Perubahan politik ekonomi internasional, dan fenomena bank Islam yang sudah menjadi realitas global.

4. Faktor Ekonomi

Sejak akhir tahun 2000-an, Industri ekonomi syariah global difokuskan pada sector konsumtif (makanan, gaya hidup, pariwisata dan industri keuangan). Tahun 2021 *consumer spending* masyarakat Muslim untuk sektor tersebut diproyeksikan mencapai USD 3 Miliar. Sementara asset perbankan syariah diproyeksikan mencapai USD 3,5 Miliar. Jumlah tersebut merupakan angka yang besar, mengingat peningkatannya mencapai 57% untuk

sektor makanan dan gaya hidup dan 75% untuk keuangan Islam jika dihitung dari tahun dasar 2015.

Jika dijabarkan lebih luas lagi, setidaknya terdapat 6 industri halal yang sudah ada dalam lingkup global, antara lain makanan, pariwisata, fesyen terkini, media halal, farmasi dan kosmetika, serta keuangan.

Dari 6 sektor yang ada, makanan halal merupakan industri halal terbesar (dilihat dari sisi *revenue*). Hingga tahun 2014, *market share* sektor ini di tingkat dunia mencapai 17%. Angka itu dapat terus bertambah, jika terdapat regulasi dan standar global yang bisa menarik lebih banyak produsen makanan halal untuk masuk ke segmen ini. Dari sisi permintaan, *spending* Muslim terhadap makanan halal diperkirakan mencapai USD 1,9 M tahun 2021 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Berangkat dari potensi dan prediksi peningkatan pendapatan dari sektor halal tersebut, *political will* pemerintah dalam mengoptimalkan peluang tersebut harus diperkuat salah satunya adalah penguatan regulasi Halal dengan mengambil langkah konkritnya yaitu terbentuknya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Peralihan Kewenangan Sertifikasi Halal dari MUI ke BPJPH

Berdasarkan Pasal 6 pada huruf (c) Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Berdasarkan pasal ini maka yang berhak untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan Label Halal pada suatu produk hanyalah BPJPH. Sebelumnya, kewenangan sertifikasi Halal juga dimiliki oleh LPPOM-MUI, akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, kewenagannya dialihkan ke BPJPH. Penghilangan kewenangan ini bertentangan dengan konstitusi, kaidah dan norma hukum, karena;

1. Kewenangan penyelenggaraan Sertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI juga memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum untuk yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan;
2. Dari data LPPOM-MUI tercatat bahwa dari tahun 2011 – 2018, LPPOM-MUI telah menerbitkan 17.398 sertifiklat halal;
3. Keberadaan LPPOM-MUI dalam sertifikasi halal sejak tahun 1989 jelas memiliki nilai historis dan mengakar dalam masyarakat. Selain memiliki nilai historis, LPOM-MUI telah memiliki infra struktur dan SDM yang cukup dan tersebar diseluruh provinsi dimana hal belum dimiliki oleh BPJPH.

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, BPJPH sebagai lembaga tunggal yang menerbitkan sertikat halal adalah bentuk monopoli peyelenggaraan sertifikasi halal yang mengabaikan kaidah filosofis dan sosiologis hukum karena:

1. Pembentukan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah mengabaikan hukum yang sudah hidup dan diterima dalam masyarakat Indonesia;
2. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya* (Pasal 29 ayat (1), UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, sertifikasi produk halal merupakan bagian ibadah, maka amanah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang hanya memberikan wewenang penerbitan dan pencabutan Sertifikasi Produk Halal hanya kepada BPJPH adalah bentuk monopoli dan jelas bertentangan dengan konstitusi;

3. Jika kita hubungkan dengan teori hukum Progressif Satjipto Rahardjo (2006), menyatakan bahwa hukum untuk manusia, hukum bukan hanya untuk bangunan peradilan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita, maka penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal adalah bentuk monopoli dan mencederai rasa keadilan.

Jika dilakukan perbandingan (*lihat gambar*) dengan negara-negara pengeksport produk halal tertinggi di dunia seperti Brazil, India, USA, China, dan Australia adalah negara-negara yang penyelenggaraan Sertifikasi Halalnya tidak dimonopoli oleh suatu lembaga tertentu, tetapi dilakukan oleh beberapa lembaga independen. Kemudian jika substansi permasalahannya adalah untuk memberi kepastian hukum, maka dalam hal ini tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan penyelenggaraan sertifikasi halal baik secara monopoli atau tidak. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha sebelum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak dapat dilakukan terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur sanksi dan penegakan hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraan jaminan Produk Halal.

Berdasarkan paparan tersebut, ada faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah tetap mengambil alih penyelenggaraan Sertifikasi Produk Halal bukanlah karena alasan LPPOM-MUI atau lembaga lainnya secara lembaga tidak mampu untuk menyelenggarakan Sertifikasi Produk Halal akan tetapi lebih terlihat pada pada keinginan Penyelenggaraan sertifikasi Produk Halal kewenangannya diambil alih oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Secara kelembagaan BPJPH berada dibawah Kementerian Agama. Artinya BPJPH itu adalah representasi dari pemerintah;
2. Penambahan penerimaan kas negara. Dana yang diperoleh dari biaya sertifikasi halal dapat dimasukkan ke kas negara melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mempertimbangkan proyeksi produksi halal pada dekade mendatang, potensi penerimaan negara dari biaya sertifikasi akan sangat signifikan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Negara;
3. Penyeragaman biaya sertifikasi dapat dilakukan karena otorisasinya berada di kementerian Keuangan sebagai lembaga pemerintah.

Problematika Regulasi

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*" agamanya (Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014). Kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan tersebut menjadi tidak efektif salah satunya disebabkan karena sejumlah regulasi sebagai peraturan pelaksana undang-undang belum terbentuk. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mempersyaratkan 1 Peraturan Presiden, 9 Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan/Keputusan Menteri.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, bahwa "*Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*" (Pasal 67 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Artinya jika Undang-undang JPH diundangkan pada tahun 2014 maka seharusnya semua PP tersebut sudah harus selesai pada tahun 2016, akan tetapi faktanya sampai saat ini hanya satu peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tanggal 3 Mei 2019.

Ditinjau dari segi waktu pembentukan dan pemberlakuannya, terlihat dengan jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan 9 Peraturan Pemerintah yang

belum terbentuk telah menyalahi amanat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal itu sendiri. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” (Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945), maka dalam hal ini pemerintah tidak tertib hukum atau melanggar asas tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena makna ‘sebagaimana mestinya’ termasuk ketaatan dalam waktu penerbitan regulasi.

Selanjutnya problematika yang sama juga terjadi pasca RUU Cipta Kerja secara resmi diundangkan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sudah diundangkan, akan tetapi sejumlah peraturan teknis pelaksana yang diamanatkan sampai saat ini belum juga diundangkan seperti Peraturan tentang penetapan biaya sertifikasi halal, Peraturan penetapan komponen biaya pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh LPH dan beberapa peraturan menteri yang mengatur teknis lainnya belum diundangkan. Belum tersedianya peraturan-peraturan menteri tersebut di atas, mengindikasikan adanya permasalahan lintas sektoral antara *stakeholder* yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH (BPJPH, MUI, LPH) khususnya BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggaraan JPH.

Menurut analisa penulis, faktor yang menjadi penyebab mengapa peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal belum tersedia atau terkesan lambat;

1. Ego sektoral dan tumpang tindih regulasi

Sejumlah PP dalam Undang-undang JPH ini terkait dengan dengan sejumlah sektor; kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian perdagangan dan industri, kementerian tenaga kerja, kementerian Koperasi dan UMKM. Banyaknya sektor yang terkait akan menimbulkan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Sehingga, salah satu paket reformasi hukum nasional adalah penataan regulasi yang ditujukan untuk menopang kebijakan Pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha. RUU cipta karya merupakan salah satu bentuk penataan regulasi yang tumpang tindih dimana Undang-undang JPH menjadi salah satu Undang-undang yang harus direvisi karena dinilai menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

2. Kompetensi Pemerintah dalam hal ini BPJPH sebagai *leading sector*

BPJPH sebagai *leading sector* dalam implementasi Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tidak memiliki kompetensi membangun sinergi antar sektor dan *stakeholder* terkait. Seharusnya dalam jangka waktu antara pemberlakuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, BPJPH sudah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

3. Tumpang tindih kepentingan

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara substansi telah menghilangkan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertikat halal yang sudah berlangsung sejak 1989 karena dialihkan kepada BPJPH. Kondisi ini secara psikologi kelembagaan tentu mempengaruhi hubungan BPJPH dengan MUI.

Perubahan Kewenangan Akreditasi Untuk LPH dan Auditor Halal

Setidaknya terdapat dua permasalahan pokok dalam sub bahasan ini yaitu haruskah LPH dan Auditor Halal dalam penyelenggaraan halal diakreditasi oleh MUI dan apa urgensi perubahan kewenangan dalam akreditasi LPH dan Auditor Halal. Penyelenggaraan PPH secara langsung sangat ditentukan pada keberadaan LPH, sedangkan keberadaan LPH sangat ditentukan oleh keberadaan Auditor Halal. Dalam hal penerbitan sertifikat halal terdapat tiga lembaga yang saling terkait yaitu BPJPH, MUI serta LPH.

Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, LPH bertugas untuk menguji kehalalan produk sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum tahapan penerbitan sertifikat Halal (Pasal 12 ayat (2), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012). Sedangkan pendirian suatu LPH mempersyaratkan memiliki minimal tiga Auditor Halal yang sudah diserifikasi oleh MUI. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa sampai saat ini belum ada LPH baru yang terbentuk. Minimnya jumlah LPH yang tersedia saat ini diakui menjadi kendala dalam pelaksanaan JPH. Karena belum ada JPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH, maka hanya LPPOM MUI yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian kehalalan suatu produk.

Saat ini LPPOM MUI sudah tersebar di 34 provinsi dan memiliki sekitar 1.300 Auditor Halal (Mastuki, 2019: 71). Kendala pembentukan LPH dan seleksi Auditor Halal sangat terkait dengan adanya dualisme kewenangan yang dimiliki oleh MUI dan BPJPH. Dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan melakukan akreditasi terhadap LPH dimiliki oleh BPJPH (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012) dan MUI (Pasal 10 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2012). Sedangkan Sertifikasi Auditor Halal merupakan kewenangan MUI (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012).

Pernyataan tersebut menimbulkan dualisme tanggungjawab yang berpotensi saling bersinggungan dengan kepentingan masing-masing serta memunculkan ego sektoral dari kedua lembaga. Jika kita hubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, hal ini jelas bertentangan dengan asas *kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi* (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012).

Sedangkan kewenangan untuk sertifikasi Auditor Halal sesuai pernyataan Pasal 10 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal secara eksplisit dinyatakan merupakan kewenangan MUI. Wewenang ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang JPH, bahwa uji kompetensi Auditor Halal dilakukan oleh MUI (Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019). Kemudian salah satu syarat menjadi seorang Auditor Halal adalah harus memperoleh sertifikat dari MUI (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012).

Efektifitas Hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan daya kerja hukum itu sendiri. Bagaimana hukum mampu mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum merupakan indikator daya hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum maka efektifitas hukum juga akan semakin tinggi. Efektivitas hukum berpengaruh jika berfungsi dengan sangat baik. Menurut teori efektifitas hukum Friedmen (2011), sistem hukum dikatakan efektif jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari sistem hukum tersebut berjalan efektif. Semakin efektif ketiga struktur tersebut maka akan sistem hukumnya akan semakin efektif.

1. Struktur Hukum

Dalam konteks ini, struktur hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal adalah BPJPH sebagai *leading sector* penyelenggara. Kemudian lembaga MUI, LPH, dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan adalah struktur penunjang yang tidak terpisahkan dari struktur hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Struktur hukum dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum JPH

dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini dijalankan menurut ketentuan atau kaidah norma yang ada (UUJPH, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksana Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, atau Peraturan Menteri). Struktur hukum inilah menerangkan tentang bagaimana BPJPH menjalankan proses sistem hukum JPH (Kusnadi, 2019: 46). Struktur hukum yang disebutkan tersebut, LPH merupakan struktur hukum yang paling lemah. Dikatakan paling lemah karena keberadaan LPH dalam penyelenggaraan JPH sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan tersebar diseluruh daerah. Saat ini jumlah LPH yang tersedia dan dinyatakan dapat beroperasi masih sangat kecil. Kemudian keberadaan LPH ini juga sangat dipengaruhi dengan ketersediaan Auditor Halal.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam sistem hukum JPH menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal (Kusnadi, 2019). Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, perundang-undangan yang digunakan saat ini adalah terdapat dua masalah pokok yang terkait dengan substansi hukum Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini, *pertama* ditemukan sejumlah peraturan turunan yang belum lengkap khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Setidaknya terdapat 12 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat. *Kedua*, ada beberapa pokok hukum yang belum diakomodir seperti sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal, sanksi bagi penyelenggara JPH yang melanggar norma, tidak dimungkinkannya berupa pencabutan sertifikat, penerbitan Sertifikasi Halal Secara Langsung oleh BPJPH yang berpotensi melegalkan yang haram.

3. Budaya Hukum

Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi Produk Halal seperti pembahasan sebelumnya, ditemukan masih sangat rendah khususnya jika dihubungkan dengan pelaku UMK. Padahal jumlah pelaku UMK >62 juta unit usaha (>99%) dari pelaku usaha nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan *political will* pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai kampanye nasional dan dilakukan secara massif dan berkesinambungan.

Ketiga elemen hukum tersebut terlihat bahwa struktur hukum masih terkendala dengan kurangnya LPH, substansinya masih terkendala dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah, belum ada sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Kemudian secara budaya, diperlukan sosialisasi dan kampanye halal secara massif. Dengan demikian, menurut teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedman, Undang-undang JPH dapat dikatakan belum efektif.

3. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan, ada beberapa pasal dalam undang-undang JPH secara prinsip mengeliminasi peran lembaga sertifikasi halal yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat khususnya lembaga Sertifikasi MUI. Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-undang ini diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan yang ada.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Konoras, (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif*
- Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji, "Kewenangan LPPOM-MUI pasca Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Sosial & Budaya Syari*, Vol. 3 No. 2 (2016).
- Agnes Fitriyantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui konsep Omnibus law, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober -November 2019.
- Akim, etal. 'Contribution of Higher Education Institutions in Supporting Indonesian Halal Product Guarantee Policy 2019', in *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP2017)*. (Paris: Atlantis Press, 2018) pp. 321–326. Available at: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icosop-17/25892103>.
- Ambali, A. R. and A. N. Bakar, "People's awareness on halal foods and products: Potential issues for policy-makers," *Procedia Soc. Behav. Sci.*, vol. 121, pp. 3–25, 2014.
- Ambaliand, A. R., A. N. Bakar, "People's awareness on halal foods and products: Potential issues for policy-makers," *Procedia Soc. Behav. Sci.*, vol. 121, pp. 3–25, 2014.
- Apriyantono, Anton, dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayaan. 2013.
- Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal, *Jurnal IUS*. Vol.4 No. 2 tahun 2016.
- Farid Wajdi, (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Rajawali Press: Depok.
- Fauzan Ali Rasyid, Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana ukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 16, No. 2, Desember 2016.
- Hayyun Durottul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.
- Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law, *Jurnal Hukum Tora*, Vol.3, No. 1, April 2017.
- Hestu Cipto Handoyo, (2011). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*, Jakarta, Danendra. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo persada: Jakarta.
- KN. Sofyan Hassan, "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- M. Erfan Riyadi, Kedudukan fatwa ditinjau dari Hukum Isalam dan Hukum Positif, *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari - Juni 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, (2010). *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mashudi, Membumikan Hukum Islam Progresif : Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal, *Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19 No.1, 2017.
- May Lim Charity. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No.1, Maret 2017.
- Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia, *Jurnal Islamika* Vol 1 No.2, Juli 2019.
- Mudhafier, F. and H. A. F. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*. 2nd edn. (Jakarta: Zakia Press, 2005).

- Murjani, "Sistem Jaminan produk halal dan Thoyib di Indonesia : Tinjauan Yuridis dan Politis, *Jurnal Fenomena*, Volume 7, No 2, 2015.
- Nidiya Waras Sayekti, Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.2, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 169 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
- Ralang Hartati, Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, ADIL: *Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1.
- Ridwan Murtadho, Nilai Filosofi Halal dalam Syariah, Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (1) Tahun 2018.
- Ridwan HR, (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta. Winata Wira, Bismar Arianto & Oksep Adhayanto, (2015). *Permintaan Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Jaminan produk Halal, dalam World Islamic Social Science Congress 2015*, Putra Jaca International Connention Centre, Malaysia.
- Selamet Mujiono, Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Sukri Indah Fitriani, "Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 51 Nomor 1, Agustus 2021.
- Supardi Mursalin, Sertifikasi dan Labelisasi Halal (Upaya Melindungi Konsumen Muslim), *Jurnal Madania*, Vol. 17 No. 2 (2013).
- Susilowati Suparto , Djanurdi, Deviana Yuanitasari dan Agus Suwandono, "Harmonisasi dan Sinkronisasi pengaturan kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, (1987). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Disertasi, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).